

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi permasalahan penting yang memerlukan perhatian dari berbagai kelompok karena sifatnya yang kompleks dan beragam. Secara ekonomi, kemiskinan sering kali ditentukan oleh jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan (*below poverty line*). Ukuran lain, menurut UNDP, mengidentifikasi kemiskinan sebagai mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$1,25 per hari dalam hal paritas daya beli atau *purchasing power parity* (Harmiati et al., 2019).

Dalam Al-quran disebutkan bantuan sosial hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan

تَضْحَىٰ وَلَا فِيهَا تَطْمَؤُا لَا وَأَنَّكَ تَعْرِىٰ وَلَا فِيهَا تَجُوعٌ إِلَّا لَكَ إِنَّ

Artinya: “Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya” (Q.S Thaha (20): 118-119).

Ayat tersebut menyatakan bahwa individu yang disebut sebagai “miskin” adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan. Dalam perspektif Islam, kemiskinan berkisar pada upaya individu-individu kaya untuk mendukung, menjaga, dan menegakkan kesejahteraan kelompok yang kurang mampu.

Kemiskinan masih menjadi tantangan besar di seluruh dunia dan mempengaruhi sebagian besar negara. Meskipun tingkat dan tingkat keparahan

kemiskinan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, namun sebenarnya tidak ada negara yang sepenuhnya bebas dari masalah ini. Bahkan negara-negara makmur dan berteknologi maju pun harus berjuang melawan kemiskinan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Kemiskinan merupakan keprihatinan bersama dan merupakan ancaman besar bagi suatu negara, terlepas dari tingkat pembangunannya (Kholif et al., 2019).

Mengatasi kemiskinan adalah tantangan sosial yang sangat rumit dan memerlukan intervensi yang cepat dan efektif agar dapat diselesaikan dengan cepat. Indonesia yang tergolong negara berkembang menempati peringkat keempat dunia dalam hal kepadatan penduduk, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara terletak pada penurunan angka kemiskinan. Meskipun jumlah penduduknya besar, Indonesia juga tidak terkecuali dari masalah ini, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat miskin, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan yang sulit dijangkau, keterbatasan akses di wilayah pedesaan seringkali menjadi salah satu pemicu kemiskinan yang signifikan. Ketidakmampuan untuk dengan mudah mengakses layanan kesehatan yang memadai, pendidikan berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan peluang ekonomi adalah faktor krusial yang terkait erat dengan tingkat kemiskinan di pedesaan. Keterbatasan akses jalan yang baik, transportasi umum yang terbatas, dan kurangnya sarana komunikasi dapat mengisolasi komunitas pedesaan dari kesempatan-kesempatan yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Garis kemiskinan, yang ditentukan berdasarkan pendapatan dan mempertimbangkan dimensi kesejahteraan, tidak mampu mencakup seluruh

cakupan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena individu yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan berdasarkan pendapatan masih dapat dianggap miskin karena kurangnya akses terhadap layanan penting dan rendahnya indikator pembangunan manusia. Selain itu, kesenjangan regional, khususnya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan, merupakan ciri-ciri kemiskinan yang menonjol. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat pedesaan (World Bank, 2000). Indonesia termasuk negara yang kemiskinannya berkepanjangan, data dari Badan Pusat Statistik (bps.go.id, 2023) menunjukkan bahwa pada September 2022, 26,36 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama karena tingginya angka kemiskinan di daerah pedesaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Teori dasar dari penelitian ini adalah teori kemiskinan Bappenas (2004) dalam (Wahyudi & Khotimah, 2022) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan

kehidupan yang bermartabat. Munculnya kemiskinan diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya yang menghambat peningkatan kesejahteraan sosial. Keterbatasan ini mungkin berasal dari faktor-faktor seperti pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan lain-lain. Badan Pusat Statistik menggunakan *Head Count Index* (HCI-P0) untuk menunjukkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau menilai proporsi yang tergolong miskin. Sebagaimana disampaikan Bappenas pada tahun (2018) dalam (Wahyudi & Khotimah, 2022) kemiskinan dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain kondisi alam dan lingkungan, faktor dinamika penduduk, eksploitasi, faktor kelembagaan dan struktural, serta faktor teknologi.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2013-2021 (Juta Jiwa)**

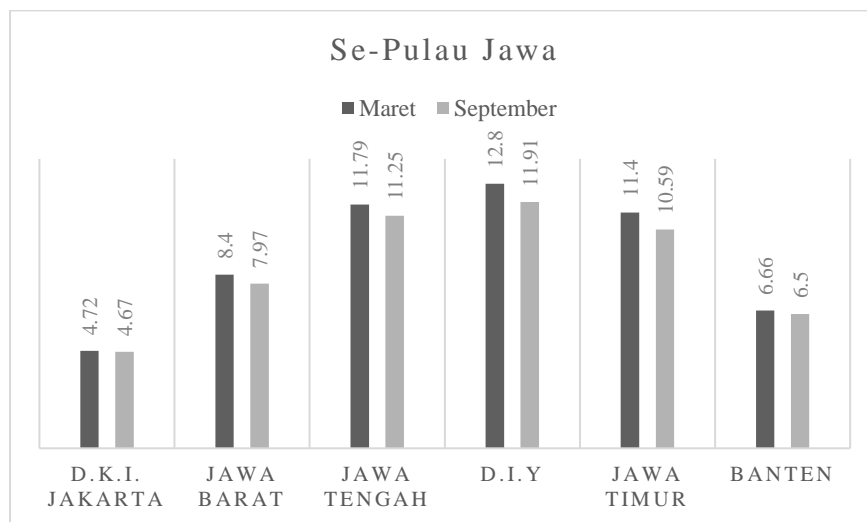
Tahun	Jumlah	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
2012	29,13	28,59
2013	28,06	28,55
2014	28,28	27,72
2015	28,59	28,51
2016	28,00	27,76
2017	27,77	26,58
2018	25,94	25,67
2019	25,14	24,78
2020	26,42	27,54
2021	27,54	26,50

Sumber: (BPS, 2024)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tabel di atas menggambarkan penurunan jumlah penduduk miskin secara garis besar walaupun tidak cukup banyak. Adanya kesenjangan antara penduduk miskin dan *non-miskin* menandakan adanya

distribusi pendapatan yang tidak normal yang diakibatkan oleh adanya lonjakan penduduk dan pemusatan pembangunan di suatu wilayah atau daerah, salah satunya adalah di Pulau Jawa. Hal ini tentu menjadi masalah serius mengingat Pulau Jawa menyumbang kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah grafik jumlah persentase penduduk miskin se-Pulau Jawa pada tahun 2021:

**Tabel 1. 2 jumlah persentase penduduk miskin se-Pulau Jawa tahun 2021**

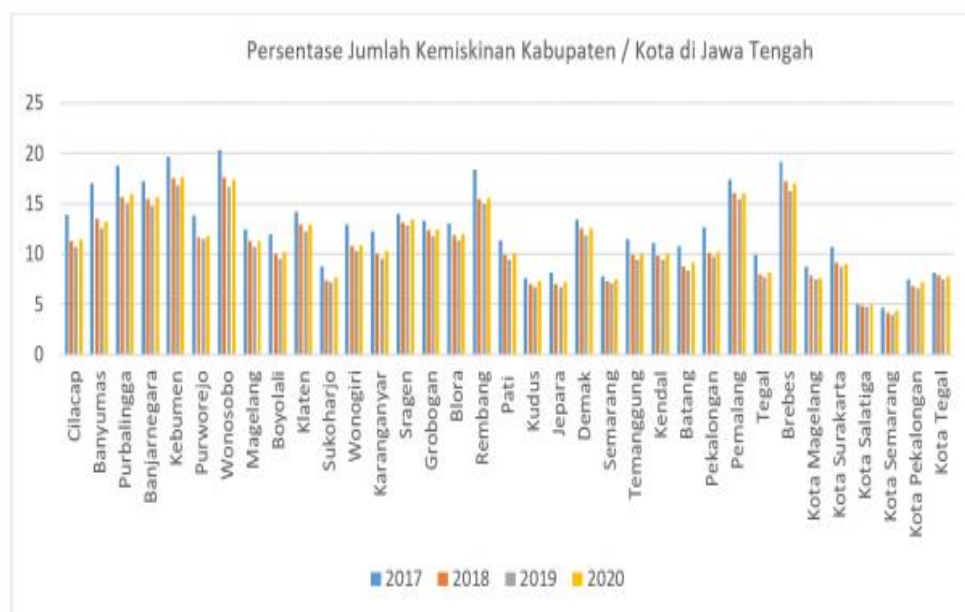


Sumber: (BPS, 2024)

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat kedua di Pulau Jawa dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi kedua sebesar 11,79 persen pada periode Maret. Lain halnya dengan Provinsi D.K.I. Jakarta yang memiliki persentase jumlah penduduk miskin terendah di Pulau Jawa yaitu sebesar 4,72 persen pada periode yang sama. Artinya

adalah Provinsi D.K.I. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara mensubsidi Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan persentase jumlah kemiskinan nasional.

**Gambar 1. 1** Persentase Jumlah Kemiskinan Kabupaten /Kota di Jawa Tengah



Sumber: <https://pusaka.magelangkab.go.id>

Selama empat tahun terakhir, secara umum terdapat tren penurunan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah, dengan sedikit peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Representasi grafis tersebut menggambarkan bahwa terjadinya kemiskinan lebih banyak terjadi di kabupaten dibandingkan kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki persentase penduduk miskin terendah, sedangkan Kabupaten Brebes memiliki persentase penduduk miskin tertinggi.

Kemiskinan, sebagaimana didefinisikan oleh (Todaro & Smith, 2006) mengacu pada kondisi dimana individu tidak mempunyai sarana untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka, yang penting untuk standar hidup yang layak. Gunawan (2000) dalam analisis (Moch, 2018) membagi faktor-faktor penyebab kemiskinan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan sering kali diakibatkan oleh faktor eksternal atau keadaan di luar kendali seseorang. Identitas seseorang sebagai kelompok miskin didasarkan pada kemampuan pendapatannya untuk memenuhi standar hidup. Kedua, prinsip ini menekankan bahwa standar hidup masyarakat harus mencakup lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan pangan dasar; hal ini juga harus mencakup pemenuhan persyaratan kesehatan dan pendidikan. Kualitas perumahan atau tatanan kehidupan yang layak merupakan aspek krusial dalam menentukan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Akibatnya, seseorang dianggap miskin jika pendapatannya jauh di bawah rata-rata, sehingga membatasi peluangnya untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Kemiskinan menimbulkan tantangan yang signifikan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di antara provinsi utama Jawa Barat dan Jawa Timur di pulau Jawa. Secara geografis, provinsi ini terbentang antara 5°40' hingga 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' hingga 111°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah 3.254.412 hektar, yang mencakup sekitar 25,04 persen luas Pulau Jawa dan 1,70 persen luas daratan Indonesia. daerah. Jawa Tengah yang dikelola dari Kota Semarang terbagi menjadi 35 kabupaten/kota, meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, dengan total 573 kecamatan yang mencakup 7.809 desa dan 769 kelurahan.

Permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah dianggap sebagai isu strategis dan menjadi prioritas utama untuk diintervensi (pusaka.magelangkab, 2022).

Tingginya tingkat kemiskinan di provinsi ini membuat penyelesaian masalah ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya bagi pemerintah sebagai pendukung peningkatan taraf hidup masyarakat. Solusi segera diupayakan untuk memitigasi tantangan yang ada dan mengurangi jumlah individu yang miskin. Beragam strategi telah diterapkan untuk memerangi kemiskinan, termasuk tindakan langsung seperti menyediakan dana stimulus untuk kegiatan ekonomi produktif dan bantuan sosial. Selain itu, dukungan tidak langsung diberikan melalui pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Di bidang pendidikan, Pemerintah Jawa Tengah telah menggagas program seperti sekolah gratis dan beasiswa bagi siswa kurang mampu secara ekonomi. Upaya pelengkap untuk mengentaskan kemiskinan mencakup inisiatif perumahan, sambungan listrik yang terjangkau, dan program jambanisasi, semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih kondusif bagi penduduknya(pusaka.magelangkab, 2022).

Dalam (Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan 2019-2023 terdapat 4 (empat) strategi, yaitu: penyediaan *basic life access*; penguatan *sustainable livelihood*; peningkatan ketersediaan dan kecukupan pangan; serta penguatan tata kelola dan koordinasi. Rencana Aksi Regional (RAD) menguraikan empat strategi yang berfokus pada layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendapatan melalui lapangan kerja, infrastruktur dasar, dan memastikan ketahanan pangan. Namun, hal



ini mengabaikan aspek-aspek penting seperti kemiskinan regional (seperti di daerah pegunungan atau pesisir) dan kesenjangan ekonomi.

Rencana tindakan dalam regulasi tersebut hanya mencakup aspek layanan dan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pangan. Namun, rencana tersebut belum memperhitungkan pendekatan makro seperti investasi, pengupahan, atau pendapatan per kapita. Rumusan rencana tindakan juga belum terhubung dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agenda yang disajikan dalam kebijakan tersebut sebagian besar merupakan program-program yang sudah ada di tingkat daerah, bukan sebuah rancangan yang disusun secara khusus dan diterapkan sebagai program baru (Prasetyo et al., 2023).

Selain dari dokumen kebijakan itu sendiri, dalam implementasinya juga muncul ketidakakuratan baik berupa rincian program maupun identifikasi sasaran penerima. Hal ini terjadi karena kurang akuratnya database kemiskinan sehingga mengakibatkan masyarakat yang berhak menerima program bantuan sosial tidak terdata dengan baik, sedangkan masyarakat tidak miskin terdata dan menerima bantuan (Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Kesimpulan tersebut diperkuat dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 yang mengungkap beberapa permasalahan. Diantaranya, data penerima bantuan sosial (bansos) ganda sebanyak 21 juta kasus, data NIK tidak valid sebanyak 3.877.965 kasus, sebanyak 41.985 kasus duplikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nama dan NIK yang sama, sebanyak 10.992.479 kasus data

NIK tidak valid, sebanyak 16.373.682 kasus. nomor kartu keluarga tidak valid, nama kosong sebanyak 5.702 , dan NIK ganda sebanyak 86.465(Dwiarto, 2023). Masalah (DTKS) atau bisa di sebut sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia tidak bisa diabaikan karena memiliki potensi untuk menyebabkan kekacauan dan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.

Oleh karena itu prasetya 2023 dalam (Prasetyo et al., 2023) selama pelaksanaan, penting untuk menilai dengan cermat struktur program dan kesesuaiannya dengan target yang diharapkan, untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat miskin secara efektif. Oleh karena itu, analisis dan pemetaan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat menjadi sangat penting. Mengingat keterbatasan pengukuran tingkat makro dalam menangkap faktor-faktor non-moneter dan keterbatasan validitas data kemiskinan, penerapan pendekatan multidimensi menjadi penting. Pendekatan seperti ini melengkapi pengukuran kemiskinan makro dengan menawarkan pemahaman yang lebih holistik dan menyarankan strategi alternatif untuk merumuskan kebijakan kemiskinan.

Di permasalahan lain terdapat kasus korupsi, Indonesia Corruption Watch (2021) dalam (Anandya et al., 2022) mencatat dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2021, terdapat setidaknya 30 kasus korupsi yang terkait dengan agenda penanganan pandemi Covid-19.

Ringkasnya, korupsi di Indonesia tidak hanya terbatas pada penyaluran bantuan sosial, namun juga pada pengadaan peralatan kesehatan seperti masker, alat tes cepat, dan vaksin. Dana yang dialokasikan untuk program bantuan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) seringkali disalahgunakan. Praktik korupsi seringkali melibatkan penyalahgunaan dan penggelapan anggaran karena kurangnya pengawasan pemerintah dan lemahnya kebijakan regulasi, khususnya terkait bantuan keuangan COVID-19 di daerah.

Permasalahan yang ada adalah identifikasi faktor-faktor yang mungkin berhubungan dengan kemiskinan di 29 kabupaten di Jawa Tengah. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan data dan uraian yang tersedia, penulis tertarik untuk mengeksplorasi dan meneliti faktor-faktor yang diyakini mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan, meliputi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) 29 Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kemiskinan?
3. Bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kemiskinan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Bagi Penulis

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi ini membantu dalam mengevaluasi seberapa efektif Program bantuan sosial dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal ini penting untuk menilai apakah program bantuan sosial yang diimplikasikan oleh pemerintah telah memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat miskin di 29 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah.

Bagi Mahasiswa/Peneliti

Mahasiswa dapat memahami secara mendalam bagaimana program bantuan sosial yang diberikan pemerintah berdampak pada penurunan terhadap kemiskinan di tingkat lokal. Hal ini memberi wawasan tentang bagaimana keputusan pemerintah dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di masyarakat.

### Bagi Pemerintah

Memberikan manfaat yang substansial bagi pemerintah dalam mengelola dan mengimplikasikan kebijakan program bantuan sosial dalam mengurangi angka kemiskinan secara lebih efisien, serta meningkatkan dampak positif terhadap masyarakat yang membutuhkan